

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- IPH pada bulan Oktober Tahun 2024 yaitu  $M1 = 0,47$ ,  $M2 = -0,26\%$ ,  $M3 = -0,53\%$  dan  $M4 = 0,55\%$ ,  $M5 = -0,67$ , pada bulan Oktober mengalami deflasi namun masih tetap terkendali dan normal, dimana dipengaruhi cuaca dan ketersediaan beberapa komoditas, sedangkan andil IPH dipengaruhi oleh cabe rawit (0.1886), telur ayam ras (0.1536), bawang merah (0.116) dan fluktuasi tertinggi pada cabe rawit mencapai 0,064%.
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2024 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, ada 3 komoditas mengalami kenaikan harga yaitu cabe rawit, telur ayam ras dan bawang merah, sementara 4 komoditas yang mengalami penurunan yaitu daging sapi, cabe merah dan minyak goreng.
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Nopember 2024 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, ada 3 komoditas mengalami kenaikan harga yaitu jeruk, minyak goreng dan bawang merah, sementara 4 komoditas yang mengalami penurunan yaitu daging sapi dan cabe merah.
- IPH pada bulan Desember Tahun 2024 yaitu  $M1 = 0,57\%$ ,  $M2 = 1,22\%$ ,  $M3 = 1,96\%$  dan  $M4 = 2,46\%$ , IPH bulan Desember mengalami kenaikan hal ini disebabkan menjelang HBKN Natal dan Tahun 2025 dimana masyarakat banyak melakukan konsumsi namun masih dalam kondisi yang stabil., andil IPH dipengaruhi oleh cabe merah (0.8713), telur ayam ras, minyak goreng (0.3818) dan fluktuasi tertinggi pada cabe rawit mencapai 0,299%.
- IPH pada bulan Desember Tahun 2024 yaitu  $M1 = 0,57\%$ ,  $M2 = 1,22\%$ ,  $M3 = 1,96\%$  dan  $M4 = 2,46\%$ , IPH bulan Desember mengalami kenaikan hal ini disebabkan menjelang HBKN Natal dan Tahun 2025 dimana masyarakat banyak melakukan konsumsi namun masih dalam kondisi yang stabil., andil IPH dipengaruhi oleh cabe merah (0.8713), telur ayam ras, minyak goreng (0.3818) dan fluktuasi tertinggi pada cabe rawit mencapai 0,299%.
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Desember 2024 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, ada 3 komoditas mengalami kenaikan harga yaitu minyak goreng, minyak goreng dan telur ayam ras, sementara komoditas yang mengalami penurunan yaitu daging sapi dan cabe merah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Adanya peningkatan harga beras premium dan medium di pasaran hal ini disebabkan adanya peningkatan harga di tingkat petani, serta adanya penyesuaian harga akibatnya naiknya harga BBM pada bulan Oktober 2024. Pada komoditas Beras, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh masa panen yang sudah lewat sehingga menyebabkan supply di beberapa daerah produsen mulai berkurang.
- Peningkatan harga bawang merah dan bawang putih merupakan akibat dari peningkatan biaya distribusi akibat meningkatnya harga BBM pada bulan Oktober 2024.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### I. Keterjangkauan Harga:

1. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA dan SiLINDA dilakukan oleh Disdagin dan Perumda Pasar Tohaga.
2. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar-pasar pada tanggal 3, 11, 17, 18, 24 dan 31 Oktober 2024 (Pasar Cileungsi, Gunung Putri, Cibinong, Citeureup I, Parung, Nanggung, Cijeruk, Citayam, Jasinga, Ciampea, Kemang, Ciseeng, Caringin, Ciomas, Megamendung, Leuwisadeng, Cibinong dan Citeureup).
3. Melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) pada tanggal 4, 16, 17 dan 18 Oktober 2024, tanggal 7, 14, 21 dan 28 November 2024 serta tanggal 22 Desember 2024 di Kantor Kec. Sukajaya, Bojonggede, Klapanunggal, Taman Pemuda, Kec. Ciseeng, Lapanga Inkopad, Kec. Gunung Putri, Kantor Samsat dan Kantor DPMD Kab. Bogor.

#### II. Ketersediaan Pasokan:

1. Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa beras sebanyak 379.460 RTM dan telur ayam sampai bulan November 2024m sudah disalurkan sebanyak 10.578 RTM.
2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 200 Kg, untuk 15.316 Jiwa) dengan pembagian :
  - a. Tahap I : 79.200 Kg (APBD Kabupaten Bogor)
  - b. Tahap II : 180.000 Kg (Dana Insentif Fiskal).

#### III. Stabilisasi produksi pertanian dengan:

- Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan realisasi sasaran pada bulan Desember seluas 22.652,72 Ha dengan premi sebesar Rp.4.077.489.600,- dan klaim yang diterima atas lahan sawah yang mengalami gagal panen seluas 438,94 Ha senilai Rp. 2.639.820.000,-.
- Bantuan sarana prasarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan).
- Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi oleh Distanhorbun Kab. Bogor.

#### IV. Kelancaran Distribusi:

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
3. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.

#### V. Komunikasi Efektif

1. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500/903-Perek Tahun 2024 tentang Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pada Natal Tahun 2024 dan Tahun

Baru 2025.

2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 3, 9, 16 dan 23 Oktober 2024, tanggal 6, 13, 20 dan 27 November 2024 serta tanggal 4, 11, 18 dan 27 Desember 2024.
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 dan 19 Oktober 2024, tanggal 9, 3 dan 30 November 2024 serta tanggal 7 dan 21 Desember 2024.
4. Mengadakan Rapat HLM tingkat Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Pj. Bupati Kab. Bogor pada tanggal 3 Desember 2024 yang menghadirkan narasumber dari BI Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Barat dan TPID Provinsi Jawa Barat dan mempublikasikannya pada 4 harian lokal Kabupaten Bogor yaitu Radar Bogor, Metro Bogor, Pakuan Raya dan Jurnal Bogor.
5. Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Baratan pada tanggal 23 Oktober 2024.
6. Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan 15 November 2024.
7. Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Nopember 2024.
8. Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Desember 2024.
9. Launching Saung Inflasi.
10. Launching Kebun Edukasi Inflasi.
11. Melakukan MoU dengan Kabupaten Belitung Timur.
12. Melakukan MoU dengan Kabupaten Purwakarta.
13. Melakukan MoU dengan Kota Batam.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. BBM sangat berpengaruh kepada peningkatan harga bahan kebutuhan pokok/penting masyarakat.
2. Bahan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh internal Kabupaten Bogor (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, gula pasir dan minyak goreng) harganya sangat dipengaruhi oleh faktor distribusi dan faktor cuaca.
3. Bahan kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi dari internal Kabupaten Bogor (daging ayam ras, telur ayam ras) pada umumnya harganya stabil, akan terjadi kenaikan harga jika harga pakan dan COD mengalami kenaikan.
4. Belum semua kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi domestik, sehingga dibutuhkan adanya peningkatan kerjasama dengan daerah lain yang mengalami surplus produksi atau dengan lembaga/instansi terkait.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peningkatan Sinergitas dan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bogor.
2. Sinkronisasi program kerja pengendalian inflasi antar lembaga/instansi terkait.
3. Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pemenuhan kebutuhan pangan di

Kabupaten Bogor.

4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian dengan melaksanakan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman cepat panen (misal: cabe, bawang, tomat). Maupun gerakan menanam tanaman pemicu inflasi.
5. Jika terjadi potensi kelangkaan LPG 3 Kg, agar dilaksanakan Operasi Pasar LPG 3 Kg.
6. Mendorong transaksi keuangan secara digital baik di lingkungan Pemerintah maupun di masyarakat.